

**RUMUSAN
HASIL SEMINAR NASIONAL PELESTARIAN PEMANFAATAN
TUMBUHAN OBAT *
30 - 31 MEI 1990, BOGOR**

Seminar Nasional Pelestarian Pemanfaatan Tumbuhan Obat telah diselenggarakan oleh Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan Fakultas Kehutanan IPB di Kampus IPB Darmaga - Bogor pada tanggal 30 - 31 Mei 1990. Seminar yang bertemakan *Strategi Nasional Pelestarian Pemanfaatan Keanekaragaman Tumbuhan Obat dan Pemantapan Penyediaan Bahan Bakunya* ini dihadiri oleh 128 peserta yang mewakili : Departemen Kehutanan, Departemen Kesehatan, Departemen Pertanian, Kantor Menteri Negara KLH, Perum Perhutani, PT Inhutani I, Departemen Transmigrasi, G.P. Jamu Pusat, Lembaga-Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi, Industri dan Peminat Jamu dan lain-lain. Seminar menyajikan pidato pengarahan dari Menteri Kehutanan dan Sekretaris Menteri Negara KLH serta membahas 13 makalah utama dan 6 makalah penunjang yang disajikan dalam bentuk poster. Seminar mengambil kesimpulan dan memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil-hasil Seminar

Seminar, lokakarya, kongres dan bentuk pertemuan ilmiah lain tentang tumbuhan obat di Indonesia sering dilakukan baik oleh lembaga penelitian, perguruan tinggi, organisasi profesi ilmiah dan swasta lainnya. Akan tetapi tindak lanjut nyata dari saran dan rekomendasi yang dihasilkan belum membuahkan perkembangan yang diharapkan.

Karena itu, Seminar memandang sudah saatnya untuk mengadakan suatu jaringan kerjasama antar berbagai pihak yang berkepentingan untuk memantau pelaksanaan saran dan rekomendasi yang dihasilkan dari berbagai pertemuan tersebut. Seminar juga menyarankan agar BALITTRO (Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat) segera mengambil prakarsa untuk melahirkan jaringan pemantauan ini.

2. Pusat Informasi

Dari berbagai makalah yang disajikan serta pembahasan selama seminar, terungkap bahwa banyak data dan informasi tentang jumlah pabrik jamu, jumlah jenis tumbuhan obat, daerah konsentrasi penyebaran, macam kandungan zat kimia, pertanian, derajat kelangkaan sesuatu jenis dan lain-lain sangat bersimpang-siur. Adanya suatu pusat atau bank data dan informasi tentang tumbuhan obat sangat dirasakan keperluannya untuk menggalakkan pelestarian pemanfaatan tumbuhan obat dan pengembangan industri jamu dan obat.

* Diselenggarakan oleh Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan Fakultas Kehutanan IPB.

Peserta seminar mencatat dengan gembira adanya upaya LIPI untuk menghimpun data dan informasi yang terpecah itu dalam suatu sistem pemusatan data di PDII (Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia) yang akan dikembangkan secara nasional dengan bantuan badan-badan penyandang dana internasional. Karena itu Seminar menyarankan agar semua pihak mendukung upaya ini sehingga upaya tersebut dapat berhasil dengan baik.

3. Pemantapan Penyediaan Bahan Baku dan Kelembagaannya

Sampai saat ini masih dirasakan sulit untuk merumuskan perencanaan pengadaan bahan baku jamu untuk dipasok pada industri karena tidak adanya data terpadu mengenai jumlah dan kebutuhan industri baik secara menyeluruh untuk setahun maupun fluktuasi musimannya. Karena itu gambaran nyata tentang *supply and demand* tidak dapat diberikan secara pasti.

Demi keberhasilan program penyediaan bahan baku, baik untuk konsumsi lokal maupun untuk ekspor, maka Seminar menyarankan agar pihak industri jamu dan obat lebih terbuka dalam memberikan jumlah keperluan bahan bakunya.

Sekalipun industri jamu dan obat yang bermodal kuat sudah mulai mengupayakan penanaman sendiri bahan baku yang diperlukannya, jumlah yang dihasilkan belum dapat mencukupi keseluruhan kebutuhan untuk target produksi jamu dan obat. Untuk itu sistem "bapak angkat", PIR, pengusaha pengelola, agro-kehutanan dan hubungan-hubungan kerja lainnya dengan pemasok telah mulai dibina.

Agar kegiatan ini dapat melembaga, maka apabila kebutuhan industri sudah diketahui dengan pasti, Seminar menyarankan agar HKTII (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), dalam hal ini Badan Khusus Wanita HKTII dapat dilibatkan untuk menjadi mitra kerja/pemasok, mengingat rapihnya pola organisasi ini yang telah tertata secara nasional. Pola pendekatan lewat koperasi merupakan jalan terbaik untuk memungkinkan tercapainya pemerataan keuntungan.

4. Penelitian

Karena tanaman obat tidak merupakan komoditi pertanian yang diprioritaskan oleh pemerintah, maka kegiatan penelitiannya juga belum mendapatkan dukungan yang memadai. Akibatnya data dan informasi dasar tentang perilaku bio-ekologi dan agronomi jenis-jenis yang diprogramkan untuk dikembangkan budidayanya secara besar-besaran di perkebunan masih banyak kekurangannya.

Berdasarkan kenyataan itu, Seminar menyarankan agar penelitian terarah untuk mengisi kekosongan tersebut perlu segera digalakkan untuk menjamin keberhasilan program INTRO (Intensifikasi Tanaman Rempah dan Obat), khususnya oleh BALITTRO, perguruan tinggi dan lembaga yang terkait dengan pembudidayaan. Informasi tentang bibit terseleksi, pemupukan serta saat

pemanenan yang tepat dan perlakuan pasca panen merupakan data yang sangat diperlukan.

Dalam hubungan dengan tumbuhan obat yang masih merupakan hidupan liar, Seminar menyarankan agar penelitian terarah yang mencakup eksplorasi, bio-ekologi, fenologi, *restocking* dan lain-lain digalakkan oleh Departemen Kehutanan dan atau bekerjasama dengan fakultas kehutanan/jurusan-jurusan terkait di perguruan tinggi dengan didukung oleh segala dana yang mungkin dapat dikerahkan.

Untuk menunjang pengembangan industri jamu Indonesia, maka diperlukan kegiatan farmakologi, khususnya eksplorasi kandungan bahan bioaktif yang bertujuan memberikan pembenaran ilmiah ramuan yang telah teruji kemanjurannya serta pengembangan bentuk baru ramuan yang ada sampai menjadi manjur. Dana penelitian ini seyogyanya ditanggung oleh industri yang harus digairahkan keikutsertaannya melalui berbagai insentif (misalnya: *tax holiday*). Sehubungan dengan itu, Seminar menyarankan agar PUSLITBANG Farmasi Departemen Kesehatan, Fakultas/Jurusan Farmasi dan jurusan-jurusan terkait di perguruan tinggi memprogramkan penelitian pengembangan industri jamu secara terpadu. Dalam kaitan ini, maka penelitian untuk merekam semua pengetahuan dan tradisi rakyat Indonesia tentang berbagai macam ramuan perlu segera dilakukan sebelum terdesak oleh persinggungan dengan kebudayaan luar.

5. Pelestarian dan Penangkaran

Kawasan Hutan Indonesia merupakan *reservoir* sumberdaya bahan obat yang sangat kaya, terutama yang belum dibudidayakan. Sebagai tapak pelestarian *in-situ* sebagian kawasan hutan telah disisihkan sebagai kawasan konservasi yang dilindungi undang-undang. Seminar ini juga menyarankan supaya Departemen Kehutanan menetapkan "kantong-kantong pelestarian" di kawasan hutan produksi yang berpotensi tinggi akan keanekaragaman tumbuhan obat dan mengelolanya untuk tujuan pelestarian pemanfaatan sumberdaya tumbuhan obat.

Untuk menjamin kelestarian pemanfaatan kekayaan tersebut, terutama untuk jenis yang terancam punah disarankan agar Departemen Kehutanan dan atau bekerjasama dengan perguruan tinggi terkait dapat menyusun program domestikasi/penangkaran tumbuhan obat. Program ini hendaknya dikaitkan dengan program pengembangan keanekaragaman manfaat lahan hutan dan program pengembangan daerah penyangga.

6. Pemerataan Manfaat

Sampai sekarang rekayasa teknologi pengembangan tumbuhan obat yang berhasil dikembangkan oleh lembaga penelitian dan perguruan tinggi lebih banyak bermanfaat dan dimanfaatkan oleh industri jamu bermodal kuat. Karena belum terjadi terobosan berarti dalam pembudidayaan (misalnya bibit unggul baru tanaman obat), maka petani kecil belum menikmati keuntungan yang

diakibatkan oleh meningkatnya perkembangan industri jamu dalam dua dasawarsa terakhir, apalagi karena panjangnya mata rantai tata perniagaan bahan baku jamu.

Berdasarkan kenyataan itu, Seminar menyarankan agar instansi terkait, misalnya: Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, Departemen Kesehatan dan Departemen Transmigrasi mengembangkan rekayasa sosial agar petani atau industri jamu bermodal kecil dapat menerima dan merasakan manfaat masukan teknologi. Upaya pelestarian pemanfaatan tumbuhan obat melalui perusahaan tradisional berskala kecil ini ditujukan untuk pelestarian kebudayaannya dan bukan aspek pelestarian keterbelakangan atau kemiskinan pengusaha kecil tadi.

7. **Pemuliaan Jenis**

Koleksi plasma nutfah yang sudah ada dan sedang serta akan dikumpulkan oleh lembaga-lembaga yang berkepentingan masih belum dimanfaatkan kecuali untuk keperluan konservasi.

Mengingat besarnya biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan untuk melestarikan koleksi yang kian bertambah itu, maka Seminar menyarankan agar BALITTRO dan perguruan tinggi segera memanfaatkan koleksi tadi dengan menyeleksi bibit terpilih serta menciptakan bibit unggul baru melalui perkawinan silang dan bio- teknologi kalau diperlukan.

8. **Sosialisasi Melalui Pendidikan**

Kesehatan merupakan salah satu unsur kebutuhan dasar manusia dan penjagaannya oleh sebagian rakyat Indonesia masih disandarkan pada jamu tradisional yang diramu dari sumber keanekaragaman hayati di sekitarnya. Pengetahuan tentang kesehatan (jamu tradisional), keanekaragaman hayati ini ternyata tertampung dalam berbagai mata ajaran pada hampir semua peringkat pendidikan formal. Karenanya sosialisasi pelestarian pemanfaatan tumbuhan obat dapat diberikan secara mantap dan mapan melalui jalur pendidikan.

Schubungan dengan kenyataan itu, Seminar menyarankan agar penyampaian pengetahuan tentang kesehatan (jamu tradisional) keanekaragaman hayati kepada peserta didik supaya diberikan dengan "pesan" yang lebih terarah dan terencana serta diikuti dengan pembinaan sarana dan prasarana penunjangnya seperti buku bacaan, pengajaran, taman obat sekolah dan lain-lain.

9. **Lembaga Kerjasama**

Pemanfaatan tumbuhan obat di Indonesia diduga akan terus berlangsung, mengingat kuatnya keterikatan bangsa Indonesia terhadap tradisi kebudayaannya. Karena itu pemakaian jamu tradisional sebagai komplemen obat modern berlangsung terus, khususnya dalam pemanfaatan jamu sebagai penjaga kesehatan (jamu habis bersalin, galian singset, tonikum, dan sebagainya). Upaya

pemerintah untuk memapankan pemanfaatan ini terlihat dalam GBHN 1988 Bab IV D tentang pengembangan obat tradisional dan adanya aparat pengawas obat tradisional dalam jajaran Departemen Kesehatan.

Sekalipun demikian, untuk lebih melembagakan kerjasama pelestarian pemanfaatan tumbuhan obat dan penggunaan obat modern, Seminar menganggap perlu untuk menyarankan adanya suatu wadah lembaga swadaya masyarakat nasional berbobot dan bergengsi dengan nama *Indonesian Herbalist Society* (seperti *National Institute of Medical Herbalist* - Inggris, *National Herbalist Association of Australian* - Australia atau *Herb Research Foundation* - USA).